

SISTEMATIKA LPPD TAHUN 2025

KATA PENGANTAR (Sekretariat Tim Penyusun)

BAB I PENDAHULUAN (BAPPEDA, BPKAD dan Biro Pemerintahan)

- 1.1 Penjelasan Umum (Bappeda, BPKAD, BKD, Dinas Dukcapil dan Biro Organisasi)
- a. Undang-Undang Pembentukan Daerah (Bappeda)

b. Data Geografis Wilayah (Bappeda)

c. Informasi Umum Data Kependudukan (Dinas Dukcapil)

d. Jumlah Kabupaten dan Kota (Bappeda)

e. Rincian Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Hukum Pembentukan Perangkat Daerah (Biro Organisasi)

No.	Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum Pembentukan
1.		
Dst		

- f. Rincian Apratur Sipil Negara pada Perangkat Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan (BKD)

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1.						
dst						

- g. Realisasi APBD (LRA dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Urusan, Program, dan Jenis Belanja) (BPKAD)
- h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan

N o	Urusan Pemerintahan	Nama Program		Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1.					
2.					
Ds t.					

- 1.2 Perencanaan Pembangunan (Bappeda)
- a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

c. Program Pembangunan Daerah (Berdasarkan RPJMD)

d. Kegiatan Pembangunan Daerah (Berdasarkan RKPD 2024)
- 1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Biro Pemerintahan Dan Otda)
- (Memuat hal-hal terkait dasar pertimbangan penerapan SPM, Kebijakan Umum Daerah dalam perencanaan dan Pencapaian SPM Tahun 2024)

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

- 2.1 Capaian Kinerja Makro (Bappeda)

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Perubahan (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia			
2.	Angka kemiskinan			

3.	Angka Pengangguran			
4.	Pertumbuhan Ekonomi			
5.	Pendapatan Perkapita			
6.	Ketimpangan Pendapatan			

(memuat penjelasan penyebab perubahan (kenaikan dan penurunan) Capaian Indikator Makro)

- 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan **(SELURUH OPD)**
- 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Outcome
- Indikator : Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD
- 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
- Indikator : Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
- 2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah **(Biro Organisasi)**
- a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja
- b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja
- c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Capaian Tahun Sebelumnya
- d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target RPJMD
- e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai
- f. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN (Setiap OPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan)

- a. **Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan**
- Menjelaskan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar Pelaksanaan Tugas Pembantuan.
- b. **Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi**
- Menjelaskan Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi, baik yang diterima dari pemerintah pusat maupun yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota.
- c. **Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan**
- Menjelaskan capaian kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diukur dengan membandingkan antara target dengan capaian selama 1 (satu) tahun anggaran.

3.1 Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

- 3.1.1 Target Kinerja
- Target Kinerja adalah target program/kegiata dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/Lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan.
- 3.1.2 Realisasi
- Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan.

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kementerian/ LPNK										
2.	Dst.										

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Kota

- 3.2.1 Target Kinerja
- Target Kinerja adalah target program/kegiata dan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur atau

dokumen/lembar penugasan.

3.2.2 Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan.

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/ Kota	OPD Pelaksana a TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Bidang Urusan										
2.	Dst.										

3.3 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala menggambarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan, baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut berisi masukan dan saran serta Langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan selanjutnya.

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (Biro Pemerintahan dan Otda)

4.1 Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan)

- 1) Jenis pelayanan dasar
- 2) Target pencapaian SPM oleh Daerah
- 3) Realisasi
- 4) Alokasi Anggaran
- 5) Dukungan Personil
- 6) Permasalahan dan Solusi

4.2 Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan)

- 1) Jenis pelayanan dasar
- 2) Target pencapaian SPM oleh Daerah
- 3) Realisasi
- 4) Alokasi Anggaran
- 5) Dukungan Personil
- 6) Permasalahan dan Solusi

4.3 Urusan Pekerjaan Umum (Dinas

- 1) Jenis pelayanan dasar
- 2) Target pencapaian SPM oleh Daerah
- 3) Realisasi
- 4) Alokasi Anggaran
- 5) Dukungan Personil
- 6) Permasalahan dan Solusi

4.4 Urusan Perumahan Rakyat (Dinas Pera, Perkim dan Pertanian)

- 1) Jenis pelayanan dasar
- 2) Target pencapaian SPM oleh Daerah
- 3) Realisasi
- 4) Alokasi Anggaran
- 5) Dukungan Personil
- 6) Permasalahan dan Solusi

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Dinas Satpol PP)

- 1) Jenis pelayanan dasar
- 2) Target pencapaian SPM oleh Daerah
- 3) Realisasi

- 4) Alokasi Anggaran
- 5) Dukungan Personil
- 6) Permasalahan dan Solusi

4.6 Urusan Sosial (Dinas Sosial)

- 1) Jenis pelayanan dasar
- 2) Target pencapaian SPM oleh Daerah
- 3) Realisasi
- 4) Alokasi Anggaran
- 5) Dukungan Personil
- 6) Permasalahan dan Solusi

BAB V PENUTUP (Tim Penyusun)

DATA PROFIL OPD